

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN AGAM.**

Rina Asmeri, SE, M.Si^{*}, Zuhendra, SE^{}, M.Kom**

^{*)**)} Program Studi Akuntansi, Akademi Akuntansi Indonesia Padang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Pendapatan, Belanja dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Agam. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016. Berdasarkan penelitian ini, evaluasi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Kabupaten Agam sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan, belanja, pembiayaan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).

ABSTRACT

The purpose of this research was to evaluate the application of Governmental Accounting Standards for income, Ekspenditure and financing at Department of Revenue and Financial Management of Local Asset (DPPKAD) of Agam Regency. Governmental Accounting Standards is the accounting principles applied in preparing and presenting the financial statements of central government and local government.

This research was a case study that used financial statements of Agam Regency of 2016. Based on this research, The evaluation which includes the recognition, measurement, disclosure and presentation of revenues, expenditures and financing on DPPKAD of Agam Regency is in accordance with the Government Accounting Standards (SAP) applicable.

Keywords: *Governmental Accounting Standards (SAP), revenues, expenditures, financing, Department of Revenue and Financial Management of The Local Asset (DPPKAD).*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik tersebut dibutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan keuangan yang *accountable* dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan dan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut (Subaweh dan Nugraheni 2008), “Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2005:134) menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia” (dalam Kusumah, 2012. P.2). Sistem Pemerintahan Daerah terdiri atas 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu penyusunan Laporan Keuangan SKPD harus dilakukan sebaik mungkin. Transaksi yang terjadi di SKPKD diklasifikasikan sebagai transaksi satuan kerja dan transaksi pada level pmda dimana sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertugas menyusun laporan keuangan daerah.

Menurut (Kusumah 2012) “Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CLAK) yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.”

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang terletak di Kabupaten Agam sebagai pelaku pengguna anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab laporan keuangan atas realisasi dana yang didapatkan pemerintah daerah, harus membuat laporan keuangan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya khususnya untuk sistem akuntansi daerah yang didasarkan atas SAP. Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Agam.”

Berdasarkan identifikasi masalah

pada uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap pendapatan dan pengeluaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten (DPPKAD) Agam dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Agam dalam menyusun laporan keuangan dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan SAP atau tidak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Agam dalam menyusun laporan keuangan dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan SAP atau tidak.

TELAAH PUSTAKA

SAP Berbasis Kas Menuju Akrua

Dalam SAP berbasis kas menuju akrua, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- a. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 84-96

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

- b. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 98-99

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

- c. Penyajian Laporan Keuangan Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

- 2) Menyediakan informasi perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) DII.
- d. Pengungkapan Laporan Keuangan Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
- 1) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - 2) Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
 - 3) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - 4) Mata uang pelaporan;
 - 5) DII

Penerapan SAP atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- a. Akuntansi Pendapatan dalam PSAP Nomor 02 paragraf 22-30 Informasi yang terdapat dalam Akuntansi pendapatan adalah Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi Belanja PSAP Nomor 02 Paragraf 3140 Informasi yang terdapat di dalam akuntansi belanja adalah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
 - Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
 - Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

- memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 - Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana pertimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- c. Akuntansi Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 50 Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- d. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 51-53 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- e. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 55-57 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Agam.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Agam merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). DPPKAD sebagai PPKD bertugas untuk membuat laporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan akuntansi yang mendasari DPPKAD dalam penyusunan laporan keuangannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun laporan keuangan yang disusun DPPKAD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan yang disajikan berguna untuk

pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi yang disusun.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh DPPKAD adalah : Basis kas, basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- 1) Basis kas ini digunakan untuk pengakuan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2) Basis akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 3) Basis akrual ini digunakan untuk pengakuan atas aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah:

- 4) Pendapatan dicatat berdasarkan nilai kotor, tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan neraca.
- 5) Belanja dicatat berdasarkan nilai kotor tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh barang /jasa tersebut.
- 6) Aset dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran yang digunakan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.

Kajian Penelitian Terdahulu

Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DPPKAD Pemkab Talaud telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan baik, sesuai dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang

SAP. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan serta melaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan penerapan SAP pada Dinas Pendapatan Daerah. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2008: 14) adalah merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti berusaha untuk menggali bagaimana penerapan SAP pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Agam tahun 2016

yang dibuat oleh DPPKAD selaku Kepala SKPD (PPKD).

Sumber data penelitian ini berasal dari bagian internal DPPKAD khususnya data bagian akuntansi yang menyusun bagian laporan keuangan pemerintahan daerah. Data yang diperoleh berupa Neraca Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2016, LRA bagian unit organisasi DPPKAD, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan dan Peraturan Bupati Toraja Utara No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Data- data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana penerapan standar yang ditetapkan pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan daerah berupa SAP pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Alat atau instrumen yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data untuk penyusunan penelitian ini berupa dokumen dan Peraturan Bupati terkait laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data- data yang diperlukan berupa dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses permintaan peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi.
- b. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. Informan yang bersangkutan dalam masalah penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi.
- c. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SAP atas pendapatan dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan DPPKAD Kabupaten Agam yang meliputi prosedur pengakuan, pengukuran, defenisi elemen dan pos dan

penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan yang disusun oleh DPPKAD selaku PPKD.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan data- data yang telah didapat dari Dinas yang bersangkutan.

Data yang diperoleh dihubungkan dengan teori yang menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan Dinas tersebut kemudian diadakan pembahasan masalah yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan pada dinas yang bersangkutan melalui studi literatur yang meliputi penerapan prosedur akuntansi untuk pendapatan, pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas.
- b. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan dinas yang bersangkutan.
- c. Menarik kesimpulan atas hasil penelitian berupa sesuai tidaknya penerapan SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta memberikan saran perbaikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1) Pengakuan Pendapatan

Dalam PSAP Nomor 02 paragraf 22, mengatur mengenai pendapatan diakui pada saat uang diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. berdasarkan PSAP ini, pembukuan pendapatan di DPPKAD selaku dinas yang mengelolah keuangan daerah

dilakukan setelah adanya setoran uang dari Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah milik pemerintah daerah.

Berdasarkan deskripsi data, Bendahara Penerimaan di DPPKAD mengakui adanya pendapatan ketika telah melakukan penyetoran atas adanya penerimaan kas yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah milik pemerintah daerah. bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebagai tempat penyimpanan kas daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2) Pengakuan Belanja

PSAP Nomor 02 paragraf 31 mengatur belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut, pengakuan atas belanja di DPPKAD seharusnya baru diakui ketika Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan kas atas transaksi belanja yang dilakukan SKPD-SKPD yang berada dibawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam yang didukung oleh bukti pengeluaran.

Berdasarkan deskripsi data, DPPKAD melakukan pencatatan atas belanja apabila telah terjadi pengeluaran kas dari kas daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, dimana jumlah kas yang dikeluarkan didasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan masing-masing SKPD.

3) Pengakuan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan dalam PSAP

Nomor 02 Paragraf 52, diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. berdasarkan PSAP ini, pengakuan adanya penerimaan pembiayaan baru diakui DPPKAD setelah adanya aliran kas yang masuk dan diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Dalam deskripsi data, penerimaan pembiayaan Kabupaten Agam berasal dari penerimaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA)

yang berasal dari tahun lalu. Pengeluaran pembiayaan dalam PSAP Nomor 02 paragraf 56, diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sehingga pengakuan adanya pengeluaran pembiayaan baru diakui oleh DPPKAD setelah adanya kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Dalam deskripsi data, pengeluaran kas diakui dan dicatat oleh DPPKAD ketika adanya pengeluaran kas dari rekening kas daerah yang didukung oleh SPM terlampir. Pengeluaran kas untuk pembiayaan dalam tahun 2016 dilakukan pada penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sulsel. Penyertaan modal ini sesuai dengan SK Bupati Agam tahun 2016.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan Pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan SAP karena pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui setelah adanya penerimaan/pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan untuk pengeluaran khusus lewat Bendahara Pengeluaran, diakui setelah disahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Pengukuran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pengukuran dalam PSAP adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pendapatan daerah Kabupaten Agam yang berasal dari PAD, pendapatan transfer pemerintah pusat maupun provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah dicatat berdasarkan jumlah yang diperoleh tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Untuk belanja pemeritah daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan, dicatat berdasarkan nilai kotor tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk

barang/jasa tersebut. pengukuran yang digunakan untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.

Berdasarkan hal tersebut, pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPAKD yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam SAP dimana basis pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar. Nilai wajarnya adalah sebesar nilai kotor yang diperoleh atas penerimaan yang didapat DPPKAD dan yang dikeluarkan untuk membiayai pembelanjaan dan pembiayaan.

Pengungkapan dan Penyajian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pengungkapan dan penyajian pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan SAP adalah untuk menyatakan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan, basis pengukuran yang dipakai serta jumlah dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diakui dalam laporan keuangan yang disusun oleh DPPKAD selama satu periode pelaporan.

Pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh DPPKAD selaku SKPKD. Pengungkapan pendapatan DPPKAD dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk pengungkapan belanja, dibagi tiga bagian yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa. Serta untuk pengakuan pembiayaan dibagi dua yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam LRA. Penyajian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA juga memberikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan anggaran

dan realisasinya selama tahun 2013, dimana selama tahun 2013 terdapat surplus sebesar Rp. 16.541.497.969,73 dari total realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan deskripsi data diatas, pengungkapan dan penyajian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disusun DPPKAD sudah berdasarkan SAP yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Agam, didapatkan kesimpulan yaitu:

- a. Evaluasi pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Evaluasi pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- c. Evaluasi penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Saran

- a. Untuk tahun anggaran berikutnya agar DPPKAD tetap berpedoman pada perturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait dengan penyusunan laporan keuangan yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Perlunya perekrutan pegawai yang memiliki keahlian dibidang akuntansi daerah untuk mengurus bagian akuntansi di DPPKAD agar pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia*. Retrieved November 10, 2014, from [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan %20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf)
- Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAKD)*. Retrieved November 12, 2014, from http://hukum.unsrat.ac.id/men/pe rmendagri_13_2006.pdf
- Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved November 12, 2014, from http://hukum.unsrat.ac.id/m en/mendagri_59_2007.pdf
- Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved November 13, 2014, from http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_24_2005.pdf
- Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Bupati Toraja Utara No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara*.
- Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan*. Retrieved Maret 31, 2015, from http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2008_28.pdf
- Kusumah, A.A. (2012), “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)”, *Jurnal Akuntansi*, 2.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh. (2008, *April*), “Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Ekonomi Bisnis* 13(1), 49.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- S, Lalombombuida., J,Tinangon., H,Wokas., (2014). “Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi*, 2(1), 111-121.